



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**TRANSLATION SHIFTS AND ACCEPTABILITY OF
POLITICAL TERMS IN NEWS ARTICLES ON THE
CABINET SECRETARIAT WEBSITE**

BACHELOR THESIS

Proposed as a Compulsory Prerequisite
for Bachelor's Degree in Applied Linguistics (S.Tr.Li)

MUHAMMAD RIZQI AUSHAF FIRDAUS

2108411045

**STUDY PROGRAM OF ENGLISH FOR BUSINESS AND
PROFESSIONAL COMMUNICATION**

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2025



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PRONOUNCEMENT

I, the undersigned:

Student Name : Muhammad Rizqi Aushaf Firdaus
Student ID : 2108411045
Study Program : **English for Business and Professional Communication (BISPRO)**
Thesis Title : Translation Shifts and Acceptability of Political Terms in News Articles on the Cabinet Secretariat Website

Hereby declare that this thesis is my original work and is free from plagiarism or any form of imitation of others' works. All quotations and references from other sources have been appropriately cited following the applicable guidelines for academic writing.

If then this pronouncement proves false, I am willing to accept any academic punishment.

Tangerang, 30 June 2025

The declarant

Muhammad Rizqi Aushaf Firdaus

NIM: 2108411045



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEGITIMATION

The following thesis is proposed by:

Student Name : Muhammad Rizqi Aushaf Firdaus
Student ID : 2108411045
Study Program : English for Business and Professional Communication
(BISPRO)
Thesis Title : Translation Shifts and Acceptability of Political Terms in News
Articles on the Cabinet Secretariat Website

It has been examined by the Board of Thesis Examiners on 19 June 2025 and decided
"PASSED"

Board of Thesis Examiners	Signature
Head of Examiners : Septina Indrayani, S.Pd., M.Tesol	
Examiner I : Fanny Puji Rakhmi, S.Hum. M.Hum	
Examiner II : Taufik Nur Hidayat, M.Hum	

Under the supervision of the Board of Thesis Supervisors

Board of Thesis Supervisors	Signature
Supervisor I : Septina Indrayani, S.Pd., M.Tesol	
Supervisor II : Taufik Eryadi Abdillah, S.S., M.Hum	

Depok, 4 July 2025

Legalized by:
Head of Business Administration
Department



Dr. Wahyudi Utomo, S.Sos., M.Si

NIP 198007112015041001

Acknowledged by:
Coordinator of English for Business and
Professional Communication Study Program

Dr. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL., M.M.,
M.Hum

NIP 196104121987032004



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PREFACE

First and foremost, all praise and gratitude be to Allah Subhānahu wa Ta‘ālā for His endless grace, love, and guidance that have enabled the writer to complete this bachelor thesis, entitled "Translation Shift and Acceptability Analysis of the Political Terms in News Articles of Cabinet Secretariat Website." This thesis is submitted as one of the requirements for obtaining a Bachelor's degree in English for Business and Professional Communication (BISPRO) at Politeknik Negeri Jakarta.

Throughout the process of writing this thesis, the writer has experienced many challenges and learning opportunities. However, by the mercy and love of Allah, along with the support of many individuals, the writer has been able to overcome those challenges and complete this work. The writer would like to express sincere appreciation to:

1. Dra. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL., M.M., M.Hum., as the Head of English for Business and Professional Communication Program Study;
2. Septina Indrayani, S.Pd., M. TESOL., as the supervisor, for the valuable guidance, encouragement, and insightful suggestions throughout the writing process;
3. Taufik Eryadi Abdillah, S.S., M.Hum., as the supervisor, for the valuable assistance in correcting the writing errors and suggestions for this thesis;
4. My Father and Mother for the immeasurable support; such the access, opportunities, and all prayers that strengthened and guided me every step of the way;
5. Lingga Hasna Salsabila, for all the hours of laughter, studying, motivation that you shared, for constantly supporting me in every step;
6. All BISPRO 2021 families for the solidarity, strength through every hardship with joyful memories and all lecturers who have given assistance.

Despite all the efforts made, the writer realizes that this thesis is not perfect. Therefore, any constructive feedback and suggestions are highly welcomed for



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

future improvement. May this thesis be a useful contribution to the study of translation and provide inspiration for future research in the field.

Tangerang, 08 June 2025

Muhammad Rizqi Aushaf Firdaus





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CONSENT OF THESIS PUBLICATION FOR ACADEMIC INTERESTS

I, the undersigned:

Student Name : Muhammad Rizqi Aushaf Firdaus
Student ID : 2108411045
Study Program : **English for Business and Professional Communication (BISPRO)**
Department : **Business Administration**
Manuscript : **Thesis (*Skripsi*)**

In the pursuit of knowledge advancement, I hereby consent to entrust and grant to Politeknik Negeri Jakarta Non-exclusive Royalty-free Right for my thesis entitled:

TRANSLATION SHIFTS AND ACCEPTABILITY OF POLITICAL TERMS IN NEWS ARTICLES ON THE CABINET SECRETARIAT WEBSITE

along with any related materials (if necessary). With this Non-exclusive Royalty-free Right, Politeknik Negeri Jakarta reserves the right to store, transfer, disseminate, manage in the form of a database, maintain, and publish my thesis while continuing to acknowledge my name as the author/creator and copyright holder.

In witness whereof, I hereby make this statement truthfully.

Made in : Tangerang,
On the date of : 30/06/2025
Declared by :

(Muhammad Rizqi Aushaf Firdaus)

Manuscript: thesis, non-seminar papers, practical work reports, internship reports, professional and specialized tasks.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRACT

This research investigates the translation of political terms in English news articles published on the Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia's website during January 2025. It aims to identify the political terms used, analyze the types of translation shifts applied based on Catford's (1965) theory, and assess how these shifts impact the quality of translation in terms of acceptability, using Nababan's (2012) framework. A qualitative-descriptive method is employed, utilizing content analysis and focus group discussions (FGDs) for data collection and validation. From 158 political terms found, the study reveals that the most frequent translation shift is the double shift, particularly the combination of structure and intra-system shifts. The acceptability assessment, conducted by qualified raters, indicates that 86% of the translations are acceptable, while the remaining are less or not acceptable due to structural, lexical, or cultural mismatches. The findings highlight the significant role of accurate shift application in ensuring culturally and contextually appropriate translations of political terms, offering valuable insights for translators, especially in government and political communication contexts.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerjemahan istilah politik dalam artikel berita berbahasa Inggris yang diterbitkan di situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia selama periode Januari 2025. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi istilah-istilah politik yang muncul, menganalisis jenis pergeseran terjemahan yang digunakan berdasarkan teori Catford (1965), serta mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas keberterimaan terjemahan dengan menggunakan teori Nababan (2012). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui analisis isi dan diskusi kelompok terarah (FGD). Dari 158 data istilah politik yang ditemukan, hasil menunjukkan bahwa jenis pergeseran terjemahan yang paling dominan adalah pergeseran ganda, khususnya kombinasi antara pergeseran struktur dan intra-sistem. Penilaian keberterimaan yang dilakukan oleh penilai ahli menunjukkan bahwa 86% terjemahan tergolong dapat diterima, sedangkan sisanya tergolong kurang dapat diterima atau tidak dapat diterima karena adanya ketidaksesuaian struktur, leksikal, atau budaya. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan pergeseran terjemahan yang tepat untuk menghasilkan terjemahan istilah politik yang kontekstual dan sesuai secara budaya, serta memberikan kontribusi penting bagi para penerjemah, khususnya dalam ranah komunikasi politik dan pemerintahan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

TABLE OF CONTENTS

PRONOUNCEMENT	ii
LEGITIMATION	iii
PREFACE	iii
CONSENT OF THESIS PUBLICATION FOR ACADEMIC INTERESTS.....	v
ABSTRACT.....	vi
TABLE OF CONTENTS	vii
LIST OF TABLES.....	ix
LIST OF FIGURES.....	x
CHAPTER I INTRODUCTION	1
1.1. Background of the Research.....	1
1.2. Research Questions	5
1.3. Research Objectives	6
1.4. Research Significances.....	6
1.5. Research Scope.....	7
CHAPTER II LITERATURE REVIEW	8
2.1. Political Terms.....	8
2.2. Translation.....	8
2.3. Translation Shift	9
2.3.1. Level Shift.....	9
2.3.2. Category Shift	9
2.4. Translation Quality Assessment	11
2.4.1. Accuracy	11
2.4.2. Acceptability	12
2.4.3. Readability	13
2.5. Previous Research	14
2.6. Theoretical Framework	16
CHAPTER III RESEARCH METHODS	18
3.1. Research Design	18
3.2. Data and Data Source	18
3.2.1. Data	18
3.2.2. Data Source	19



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.3. Sampling Technique	19
3.4. Data Collection Technique	19
3.4.1. Content Analysis	20
3.4.2. Focus Group Discussion (FGD).....	20
3.4.3. Questionnaire	21
3.5. Data Validity	21
3.5.1. Data Source Triangulation.....	21
3.5.2. Method Triangulation.....	22
3.6. Data Analysis.....	22
3.6.1. Domain Analysis	22
3.6.2. Taxonomic Analysis	23
3.6.3. Componential Analysis	24
3.6.4. Cultural Theme Analysis.....	25
CHAPTER IV RESULT & DISCUSSION	26
4.1. Result.....	26
4.1.1. Political Terms.....	26
4.1.2. Translation Shift.....	30
4.1.2. Acceptability Assesment	49
4.2. Discussion.....	51
CHAPTER V CONCLUSION & SUGGESTION.....	64
5.1. Conclusion.....	64
5.2. Suggestions.....	65
REFERENCES.....	ix
ATTACHMENTS.....	xiii



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LIST OF TABLES

Table 2.1. Assessment Instrumen of Accuracy.....	11
Table 2.2. Assessment Instrumen of Acceptabilty	13
Table 2.3. Assessment Instrument of Readability	13
Table 3.1. Domain Analysis	23
Table 3.2. Taxonomic Analysis	23
Table 3.3. Componential Analysis	24
Table 4.1. Political Terms Result	26
Table 4.2. Translation Shifts Results.....	30
Table 4.3. Variant Classifications of Translation Shifts Results	31
Table 4.4. Double Translation Shift Results.....	32
Table 4.5. Single Translation Shift Results	38
Table 4.6. Triple Translation Shift Result	42
Table 4.7. Quadruple Translation Shift Results	46
Table 4.8. Without Translation Shift Result	47
Table 4.9. Acceptbilty Assessment Result	49
Table 4.10. Translation Shift and Acceptability Result.....	58
Table 4.11. Variant Score and Frequency	60

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LIST OF FIGURES

Figure 2.1. Theoretical Framework.....	17
Figure 3.1. Cultural Theme Analysis (Santosa, 2021)	25





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER I INTRODUCTION

1.1. Background of the Research

In this age of global progress, communication continues to expand and develop in a broader direction, one of which is communication between two or more countries involving two or more languages. In order for communication with different languages to remain effective, it is necessary to have the knowledge to transfer a language in written or spoken form, which is called and known as translation. According to Wehmeier et al (2005) in Regmi et al (2010), translation is an activity of transferring language from the Source Language (SL) to the Target Language (TL) aimed for the meaning fully conveyed to the reader. In other words, translation is an important activity or the key to the success of effective communication in two or more countries involving two or more languages.

The importance of translation is certainly considered by the government of our country, Indonesia to establish communication and cooperative relations with local or international communities. Relating to this matter Indonesian government certainly has a special institution to handle the field of scripts and translations for local and international forums and meetings, namely the Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia.

Based on the Regulation of the Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 on the Organization and Work Procedures of the Cabinet Secretariat (Peraturan Sekretaris Kabinet, 2020), it is explained that the Cabinet Secretariat plays a role in cabinet management support to the President and Vice President in realizing presidential script preparation, documentation and distribution of presidential speeches, as well as translation of quality Government publications and official documents.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Scripts of speeches and other government publications, such as news articles that are written in Indonesian as the original version and including their translated version, which in English language are published on the official website of the Cabinet Secretariat. On that website there are several forms of translation in the government, ranging from the translation of the President's speeches for local and international state forums, translation of press statements when the President makes policies, oral translation for international state meetings, and especially the translation of state news articles (Cabinet Secretariat, 2025).

News articles are the publication that contain various state issues and are more often seen by the general public than transcripts of speeches or press statements with 104.590 visitors from January 2025 which consist of 45 articles retrieved from Cabinet Secretariat (2025), with an average of 52.254 people visiting each article, and this data number is tentative (uncertain) because visitors can still see the publication even though the article is in the past. Therefore, news articles are the content of publications of the Cabinet Secretariat that become the main information source for local and even international communities.

Relating to the various state issues, news articles publication also have political themes and certainly contain political terms or political language inside of which such as the following examples:

Example: News article of 13/01/25, *“Presiden Prabowo Panggil Jaksa Agung dan Jajaran Jaksa Agung Muda Bahas Korupsi dan Perizinan Ilegal”* (ST) // *“President Prabowo, Attorney General Discuss Corruption Eradication Actions”* (TT).

SL: *Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka...*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

TL: President Prabowo Subianto had a closed-door meeting with the Attorney General and **Attorney General Assistants** at the Merdeka Palace...

The political terms found in the news article dated 13/01/25 with the title “*Presiden Prabowo Panggil Jaksa Agung dan Jajaran Jaksa Agung Muda Bahas Korupsi dan Perizinan Ilegal*” as the original version and “President Prabowo, Attorney General Discuss Corruption Eradication Actions” as the translated version, is “*Jaksa Agung Muda*” which translates to “Attorney General Assistants.” The term of is categorized as a political term because it refers to administrative positions in law enforcement institutions that have a strong political dimension based on the appointment process, the authority possessed, and its impact on Indonesia's legal and political constellation. Therefore, the term can reflect political realities and is part of the country's political terms.

In the translation process, political terms that appear in the news articles of the Cabinet Secretariat, especially in the January 2025 period, are translated by utilizing translation shifts on the grounds that each country has a different culture and language structure. In the example above, the word “*Jaksa Agung **Muda***” is translated to “Attorney General **Assistants**” thereby experiencing a class shift, which, according to Catford (1965) class shift is the translation shift that changes the word class of the word marked in red, which changed from adjective to noun. The shifts in translation can also have an impact on the quality of a translation, which Agung & Suastini (2022) stated that translation shifts must always occur and their value is important for the purpose of accuracy, acceptability, and readability in the target language. However, the result of the translation shift in the example above will be less acceptable if it is not due to the culture and structure of the target language, because “Assistant Attorney General” and “Attorney General Assistants” have different meanings. According to Washington State Office of the Attorney General (2025),

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

“Assistant Attorney General” is a specific title which lead to specific divisions or areas of legal work within the Attorney General’s Office while “Attorney General Assistants” is more general term that can refer to various attorneys who work to support Attorney General such as Deputy Attorney General, Assistant Attorneys General, staff attorneys, and others. In the example above, “*Jaksa Agung Muda*” is a specific title that leads a specific division; therefore, the most suitable translation is “Assistant Attorneys General” because it is in line with the cultural aspect of the target text, and this term has been validated by several media. This is the interesting part of political term research. The translator has to understand the political culture of both languages at the same time to decide what translation shift is appropriate, so that the translation of the political terms may have a high quality of acceptability.

Several studies have discussed the political term aspect, such as the research conducted by Khoshimov (2020) and Nisya (2020). The political term is discussed in the research of Khoshimov (2020) by analyzing translation techniques and their impact on the quality of accuracy and acceptability of the translation. Although it discusses the same research object, namely political terms and translation quality, there are differences in the source of finding data. The research conducted by Khoshimov (2020) took data on political terms from a political film, “Snowden” and “White House Down,” while this research will take the data on political terms from news articles published by the Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia in January 2025. Khoshimov also analyzed two aspects of translation quality assessment which is accuracy and acceptability using the theory of Nababan (2012), although this research will use the same theory, this research will focus its translation quality assessment only on the aspect of acceptability because Nababan (2012), states that acceptability is an important aspect of assessment because it



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

carries the conventions of cultural elements from the target language to the source language and no one has examined only the aspect of acceptability.

Nisya' (2020) is also analyzing a political text in the aspect of translation shifts, but the focus of the research is only on the shifts, not on specific linguistic units in the Jokowi's IMF World Bank 2018 presidential speech. However this research used the same theory of translation shift as Nisya (2020), which is translation shift theory by Catford (1965).

Those previous researches have indeed examined translation shifts, acceptability quality, and political terms. Therefore, researchers are interested in conducting research on the translation of the news articles of January 2025 period on the Cabinet Secretariat Republic Indonesia's website with the main focus is to analyze the translation shifts using Catford's (1965) theory that occur in the translation of political terms from the articles and their impact on the quality of acceptability of the translations.

1.2. Research Questions

Based on the research background above, the research questions can be organized as follows:

1. What are the political terms found in the news articles of January 2025 period on the Cabinet Secretariat Republic Indonesia's website?
2. What are translation shifts that occur in the political terms translation of the news articles of January 2025 at the Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia's website and which type is the dominant?
3. How is the quality of acceptability of the translated political terms within the translation shift of the news articles of January 2025 period on the Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia's website?



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.3. Research Objectives

The results of this research are expected to fulfill the following objectives:

1. This research analyzes what political terms are found in the news articles of January 2025 period on the Cabinet Secretariat Republic Indonesia's website.
2. This research identifies the types of translation shifts and the most used translation shift that occur in the political terms translation of the news articles of January 2025 period on the Cabinet Secretariat Republic Indonesia's website.
3. This research analyzes how is the quality of acceptability of the translated political terms within the translation shift of the news articles of January 2025 period on the Cabinet Secretariat Republic Indonesia's website.

1.4. Research Significances

The results of this research are expected to provide the following benefits:

1.4.1. Theoretical Significance

This research will discuss how translation shifts occur and affect the assessment of the quality of acceptability of translated political terms in news articles. Therefore, this research is expected to contribute to translation studies, especially related to translation shift and translation quality.

1.4.2. Practical Significance

a. Translator

This research takes data from news articles on the Cabinet Secretariat's website that have been translated by the relevant translation officials. Therefore, this research is expected to provide input for translators, especially in the Cabinet Secretariat, in producing and maintaining quality translations.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

b. Researcher

This study is also expected to benefit the researcher himself in knowing the causes and effects of translation shifts on translation quality. Through this research, the researcher can learn more about the development of translation and the process to achieving acceptable translation.

c. Further Research

This research is also expected to provide benefits for further research as reference material.

1.5. Research Scope

This research is limited to the political terms in the news articles of January 2025 period on the Cabinet Secretariat Republic Indonesia's website as the subject. The object of this research is only focused on translation shift with the theory of Catford that occurred in the political terms translation from the articles. The second object is only focused on analysis with translation assessment of Nababan consisting of accuracy, readability, and acceptability. However this study is only focused on the acceptability assessment of the political terms translation shift that appear in those articles.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CHAPTER V CONCLUSION & SUGGESTION

5.1. Conclusion

This research investigated how political terms are translated from Indonesian to English in news articles published on the Cabinet Secretariat's website for the period of January 2025. The research focused on identifying the political terms, the types of translation shifts that occur based on Catford's (1965) theory, and how these shifts affect the quality of translation in terms of acceptability, as defined by Nababan et.al, (2012).

From the analysis, 158 political terms were identified in the news articles. These terms were subjected to various types of translation shifts, including structure shift, unit shift, class shift, and intra-system shift. These shifts occurred in combinations ranging from single to quadruple shifts, with double shifts being the most dominant (46% of cases). The shifts were employed not only due to linguistic differences but also to accommodate cultural and grammatical norms of the target language.

It was found that structure shift and intra-system shift was the most common and necessary type of shift due to inherent grammatical differences between Indonesian and English which also played a key role in improving target-language naturalness. However, some combinations of shifts (especially involving class shifts) occasionally led to less acceptable outcomes due to misinterpretation of political context or inappropriate word class transformation.

The acceptability of the translations was assessed through Focus Group Discussions (FGDs) and questionnaires involving expert informants. The findings revealed that 86% of the translated political terms were acceptable, 13% were less acceptable, and only 1% were not acceptable. This indicates a generally high quality of translation in terms

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

of acceptability, despite some cases of grammatical inaccuracies or inadequate equivalence in complex or culture-specific terms.

In conclusion, the research demonstrates that translation shifts especially the double and single variant are must occurred for the purpose of achieving acceptable translations of political terms. However, the effectiveness of these shifts depends on the translator's understanding of both linguistic and political-cultural contexts. A deep comprehension of both source and target languages, especially in political discourse, is vital to maintain meaning, appropriateness, and acceptability.

5.2. Suggestions

5.2.1. Suggestions for Translators

1. Deepen Understanding of Political Terminology

Translators working on government texts should continuously update their knowledge of political terms and concepts, especially those unique to Indonesia, to ensure accurate and culturally appropriate translations.

2. Apply Translation Shifts Judiciously

Use translation shifts such as structure, unit, class, or intra-system shifts only when necessary to maintain clarity and naturalness in the target language. Avoid over-applying shifts that might distort the original meaning or confuse the target audience.

3. Respect Cultural Equivalence

Political terms often carry ideological or institutional nuances. Translators should ensure that terms like “Jaksa Agung Muda” are translated with equivalents (e.g., “Assistant Attorney General”) that reflect the same institutional level and function in the target culture.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4. Use Existing Official Translations When Available

Refer to previously validated official documents and terminologies used in UN bodies, embassies, or government agencies to maintain consistency.

5.2.2. Suggestions for Researchers

1. Expand the Scope Beyond Acceptability

Future research could incorporate other quality dimensions like accuracy and readability to provide a more comprehensive translation quality analysis.

2. Investigate Audience Reception

Study how different target audiences (e.g., diplomats, general public, international media) perceive and interpret political term translations to assess communicative effectiveness.

3. Compare with Other Government Bodies or Languages

Extend the analysis to other institutions (e.g., Ministry of Foreign Affairs) or translate into other target languages (e.g., French, Arabic) to see how translation strategies vary.

4. Explore the Impact of Machine Translation Tools

Examine how tools like Google Translate or DeepL handle political terms and whether human post-editing is required to reach acceptable quality.

5. Develop a Glossary of Political Terms

As an applied output, researchers can compile a bilingual glossary of political terms and their most appropriate translations to support practitioners in the field.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

REFERENCES

- Agung, G. A., & Suastini, N. W. (2022). Translation Shift in English-Indonesian Translation of “The Things You Can See Only When You Slow Down”. *IJELLE (International Journal of English Linguistics, Literature, and Education)*.
- Alzuhdy, Y. A. (2014). Analisis Translation Shift dalam Penerjemahan Bilingual Bahasa Inggris. *Jurnal Diksi*, 22, 185-193.
- Bania, A. S., & Faridy, N. (2023). Quality of translation via google translate in comedy texts. *Englisia Jurnal*.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cabinet Secretariat. (2025, April 07). *Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia English Version*. Retrieved from Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia: <https://setkab.go.id/en>
- Cahyono, A. (2019). *Menciptakan Sebuah Kekuatan Komunikasi Efektif: Unggul Berkomunikasi*. Ponorogo: Penerbit Uwais Inspirasi Indonesia.
- Catford, J. C. (1965). *A Linguistic Theory of Translation*. Oxford: Oxford University Press.
- Dijk, T. A. (1998). *Ideology: A Multidisciplinary Approach*. Barcelona: SAGE.
- Dijk, T. V. (1997). What is Political Discourse Analysis? *Belgian Journal of Linguistics*.
- Effendy, O. U. (2008). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Heni, N., Khafifah, M. N., Amini, R., Damayanti, R. V., & Inawati, I. (2024). Translation Shift in the English-Indonesian Translation of the “ The Woodsman and The Crane” Story. *SCOPE: Journal of English Language Teaching*.
- Husseni, S., & Hartono, R. (2018). Semantic Shift in The English -Indonesian Translation of Dessen’s What Happened to Goodbye. *English Education Journal*, 13.
- Ibrahim, H. S. (2023). Difficulties of Translating News Political Terms from English into Arabic and vice versa in Selected Newspapers. *Journal of Language Studies Vol.7,No.4*, 405-427.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2025, March 18). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*. Retrieved from KBBI Web: <https://kbbi.web.id/istilah>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2025, April 30). *Kata dasar Politik Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan): <https://kbbi.web.id/politik>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2025, April 30). *Kata dasar: Istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring*. Retrieved from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan): <https://kbbi.web.id/istilah>
- Khoshimov, M. (2020). *Analisis Terjemahan Istilah Politik pada Subtitle Film Snowden dan White House Down*. Diambil kembali dari Institutional Repository UNS: <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/81971/Analisis-Terjemahan-Istilah-Politik-pada-Subtitle-Film-Snowden-dan-White-House-Down>
- Maryani. (2019). An Analysis of Ideology and Translation Quality on Bilingual text “NANDA” English into Indonesian. *Journal of English Education Literature and Linguistics*.
- Nababan, A. N. (2012). PENGEMBANGAN MODEL PENILAIAN KUALITAS TERJEMAHAN. *Kajian Linguistik dan Sastra*, 20-53.
- Nida, & Taber. (1982). *The Theory and Practice of Translation* . Netherlands: E. J. Brill, Leiden.
- Nisya', D. F. (2020). EXPLORING INDONESIAN-ENGLISH TRANSLATION SHIFT IN JOKOWI’S IMF WORLD BANK 2018 SPEECH. *Journal BASIS*.
- Nugraha, R. F. (2023). Idiom Translation Quality Assessment on “Landline” Novel by Rainbow Rowell. *EBONY: Journal of English Language Teaching, Linguistics, and Literature*.
- Nur’azizah, W. (2015). AN ANALYSIS OF STUDENTS’ TRANSLATION WORKS OF A BARACK. *Journal of English and Education* , 134-144.
- Peraturan Sekretaris Kabinet. (2020). *PUUdoc: Perseskab_Nomor_1_Tahun_2020*. Retrieved from JDIH Sekretariat Kabinet: https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176145/Perseskab_Nomor_1_Tahun_2020.pdf



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Regmi, K. (2010). Understanding the Processes of Translation and Transliteration in Qualitative Research. *IJOM: International Journal of Qualitative Methods*, 2-3.
- Santosa, R. (2021). *DASAR-DASAR METODE PENELITIAN KUALITATIF KEBAHASAAN*. Surakarta: UNS PRESS.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharjono, S. (2018). ANALYSIS OF TRANSLATION SHIFT IN THE INDONESIAN TRANSLATION DALIH PEMBUNUHAN MASSAL: GERAKAN 30 SEPTEMBER DAN KUDETA SUHARTO BY JOHN ROOSA OF AN ENGLISH DOCUMENT PRETEXT FOR MASS MURDER: THE SEPTEMBER 30TH MOVEMENT AND SUHARTO'S COUP D'ÉTAT IN INDONESIA. *Jurnal Elsa*.
- Washington State Office of the Attorney General. (2025, April 27). *Office Division: Office Overview*. Retrieved from Washington State Office of the Attorney General Web site: <https://www.atg.wa.gov/office-divisions>
- Wehmeier, McIntosh, Turnbull, & Ashby. (2005). *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford : Oxford University Press.
- Widarwati, N. T., Purnomo, B., Astuti, P. I., & Wijayava, R. (2024). ANALYSIS OF TRANSLATION SHIFT IN BILINGUAL CHILDREN'S STORYBOOKS. *Journal of English Education*.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CURRICULUM VITAE



Muhammad Rizqi Aushaf Firdaus, born in Tangerang on 17 October 2001. Domiciled in Vila Tangerang Elok Blok D3/11, RT 013, RW 007, Kutajaya, Pasar Kemis, Tangerang Regency, Banten Province. Researcher graduated from SDN Gembor 06 in 2013, SMPIT Ruhul Jadid in 2016, SMAIP Permata Insani Islamic School in 2019, and currently researcher is a final year student (S.Tr. Li) in Politeknik Negeri Jakarta, Department of Business and Administration, English for Business and Professional Communication Study Program.

Available Contact:

E-mail : aushafirdaus@gmail.com

WhatsApp : +6285831986830

LinkedIn : Muhammad Rizqi Aushaf Firdaus

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**ATTACHMENT I
DOMAIN ANALYSIS**

NO	ST	TT
02/01/25		
1	Presiden	President
2	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Head of the Supreme Audit Regency (BPK)
3	Keuangan negara	State Financial
4	Pemerintah Pusat	Central Government
5	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Ministry of Communications and Informatics
6	Kementerian Pertanian	Ministry of Agriculture
7	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ministry of Energy and Mineral Resources
8	Badan Pangan Nasional	National Food Agency
9	Good governance	Good governance
10	Kabinet Merah Putih	Red and White Cabinet
11	Badan-badan khusus PBB	Special agencies of the United Nations
12	Sidang Umum PBB	UN General Assembly
03/01/25		
13	Presiden	President
14	Menteri Koordinator	Coordinating Minister
15	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Coordinating Ministry for Community Empowerment
17	Dana pinjaman bergulir	Revolving loan fund
18	Bantuan sosial	Social assistance
19	Kementerian Sosial	Ministry of Social Affairs
07/01/25		
20	Presiden	President
21	Rapat terbatas	Limited cabinet meeting
22	Menteri Kabinet Merah Putih	Ministers of the Red and White Cabinet
23	Kebijakan pro-rakyat	Pro-people policies
24	Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP)	Minister of Housing and Settlements
07/01/25		
25	Presiden	President
26	Dewan Perwakilan Rakyat	House of Representatives
27	Ketua Komisi VIII	Chairperson of Commission VIII
28	Wakil Ketua DPR	Vice Speaker of the House of Representatives
07/01/25		
29	Presiden	President
30	Dewan Ekonomi Nasional	National Economic Council
31	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reforms
32	Program prioritas pemerintah	Government's priority programs
09/01/25		
33	Presiden	President
34	Perdana Menteri	Prime Minister
35	Hubungan bilateral	Robust bilateral relations
36	Isu strategis	Strategic issues
11/01/25		
37	Presiden	President
38	Perdana Menteri	Prime Minister
39	Hubungan bilateral	Robust bilateral relations
40	Kunjungan kehormatan	Honorary visit
11/01/25		
41	Presiden	President
42	Perdana Menteri	Prime Minister
43	Kunjungan resmi	Official visit
44	Upacara kenegaraan	State ceremony
45	Tamu negara	State guest
46	Hubungan diplomatik	Diplomatic ties
47	Pemerintah Indonesia	Indonesian government
48	Anggota DPR	Member of the parliament



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

13/01/25		
49	Presiden	President
50	Sekretaris Kabinet	Cabinet Secretary
51	Menteri Komunikasi dan Digital	Minister of Communication and Digital Affairs
52	Layanan publik	Public service
53	Reformasi birokrasi	Bureaucratic reforms
13/01/25		
54	Presiden	President
55	Sekretaris Kabinet	Cabinet Secretary
56	Jaksa Agung	Attorney General
57	Jaksa Agung Muda	Attorney General Assistants
58	Isu pemberantasan korupsi	Corruption eradication
59	Pembangunan nasional	National development
60	Kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu	Personal or certain group interest
61	Kejaksaan	Attorney General's Office
14/01/25		
62	Presiden	President
63	Sekretaris Kabinet	Cabinet Secretary
16/01/25		
64	Presiden	President
65	Dinamika global yang penuh tantangan	Challenging global dynamics
66	Kepala Negara	The Head of State
67	Persaingan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi dunia	Geopolitical, geoeconomic, and global geostrategic competition
68	Kemakmuran bangsa	The nation's advance
69	Kebijakan pemerintah	Government policies
70	Kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia	The importance of the Indonesian nation and people
16/01/25		
71	Presiden	President
72	Pemerintahan Republik Indonesia	The Government of the Republic of Indonesia
73	Pembangunan nasional	National development
74	Program swasembada pangan	Food self-sufficiency program
16/01/25		
75	Presiden	President
76	Komitmen pemerintah	The Government is committed to...
77	Program makan bergizi gratis	The Free Nutritious Meal program
78	Kepala Negara	President
20/01/25		
79	Presiden	President
80	Kabinet Merah Putih	Red and White Cabinet
20/01/25		
81	Presiden	President
20/01/25		
82	Presiden	President
83	Proyek makan bergizi gratis	The free nutritious program
20/01/25		
84	Presiden	President
85	Menteri Kelautan dan Perikanan	Minister of Marine Affairs and Fisheries
86	Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan	Deputy Minister of Marine Affairs and Fisheries
87	Undang-Undang Cipta Kerja	The Omnibus Law on Job Creation
21/01/25		
88	Presiden	President
89	Rapat terbatas	Limited meeting
90	Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)	The development of the new Capital of Nusantara
91	Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Coordinating Minister for Infrastructure and Regional Development
92	Prioritas pemerintah	The Government's priority
93	Ibu kota politik	Political capital
94	Lembaga legislatif	Legislative institutions
95	Lembaga yudikatif	Judicial institutions
96	Dewan Perwakilan Rakyat	The House of Representative
97	Dewan Perwakilan Daerah	The Regional Representative Council
98	Majelis Permusyawaratan Rakyat	The People's Consultative Assembly



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

99	Visi Presiden	President's vision
100	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	State Budget
101	Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara	Head of the Nusantara Capital Authority
102	Menteri Perumahan	Minister of Housing and Residential Areas
21/01/25		
103	Presiden	President
104	Rapat terbatas	Limited cabinet meeting
105	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Coordinating Minister for Economic Affairs
22/01/25		
106	Presiden	President
107	Sidang Kabinet Paripurna	Plenary Cabinet Meeting
108	Seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih	Red and White Cabinet Ministers
109	Kinerja kabinet	The cabinet performance
110	Mandat rakyat	The people's mandate
111	Menteri dan wakil menteri	Ministers and deputy ministers
112	Masa pemerintahan	The Government performance
113	Kepala Negara	The Head of State
114	Jajaran pemerintah	Government ranks
115	Administrasi negara	State administration
116	Partai politik	Political parties
117	Pejabat negara	State officials
118	Kebijakan	Adopted policies
119	Kepentingan negara	The country's importance
22/01/25		
120	Presiden	President
121	Kontinuitas pemerintahan	Continuity of the Government program
122	Pembangunan nasional	National development
123	Sidang Kabinet Paripurna	Plenary Cabinet Meeting
124	Kepala Negara	The President
125	Pembangunan nasional	National development
22/01/25		
126	Presiden	President
127	Sidang Kabinet Paripurna	Plenary Cabinet Meeting
128	Menteri Kabinet Merah Putih	Ministers of Red and White Cabinet
129	Swasembada pangan	Food self-sufficiency
130	Swasembada energi	Energy self-sufficiency
24/01/25		
131	Presiden	President
132	Hubungan bilateral	Bilateral ties
24/01/25		
133	Presiden	President
134	Kunjungan kehormatan	Courtesy call
135	Menteri Luar Negeri India	Minister of External Affairs
136	Duta Besar RI di New Delhi	Indonesian Ambassador to India
137	Utusan Khusus Perdana Menteri	Special Envoy to the Prime Minister
138	Tamu negara	State guest
139	Acara kenegaraan	State events
25/01/25		
140	Presiden	President
141	Upacara kenegaraan	Ceremonial reception
142	Kunjungan kenegaraan	State visit
143	Hubungan bilateral	Bilateral relations
144	Perdana Menteri India	Prime Minister of the Republic of India
145	Kemerdekaan Indonesia	The independence of Indonesia
25/01/25		
146	Presiden	President
147	Kunjungan kenegaraan	State visit
148	Hubungan bilateral	Bilateral relations
149	Perjuangan kemerdekaan	Independence struggle
25/01/25		
150	Presiden	President
151	Pertemuan bilateral	Bilateral meeting
152	Kunjungan kenegaraan	State visit



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

153	Pertemuan terbatas	Limited meeting
25/01/25		
154	Presiden	President
155	Perdana Menteri	Prime Minister
156	Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia	Ministry of Communication and Digital Affairs of the Republic of Indonesia
157	Kementerian Kesehatan Indonesia	Ministry of Health of the Republic of Indonesia
158	Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga Republik India	Ministry of Health and Family Welfare of the Republic of India
159	Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi Republik India	Ministry of Electronics and Information Technology of the Republic of India
160	Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia	Ministry of Culture of the Republic of Indonesia
161	Kementerian Kebudayaan Republik India	Ministry of Culture of the Republic of India
25/01/25		
162	Presiden	President
163	Hubungan bilateral	Bilateral relations
164	Tamu kehormatan	Guest of honor
26/01/25		
165	Presiden	President
167	Resepsi diplomatik	Diplomatic reception
168	Wakil Presiden	Vice President
169	Perdana Menteri	Prime Minister
27/01/25		
170	Presiden	President
171	Upacara penyambutan kenegaraan	The state welcoming ceremony
172	Hubungan bilateral	Bilateral relations
173	Hubungan diplomatik	Diplomatic relations
27/01/25		
174	Presiden	President
175	Perdana Menteri	Prime Minister
176	Pertemuan	Bilateral meetings
177	Kerja sama strategis	Cooperation
178	Tantangan geopolitik	Geopolitical challenges
179	Kementerian	Ministries
27/01/25		
180	Presiden	President
181	Perdana Menteri	Prime Minister
182	Kunjungan kenegaraan	State visit
183	Delegasi	Delegates
184	Konferensi pers	Press conference
185	Hubungan yang erat	The close relations
186	Tanda kehormatan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama	The Most Esteemed Royal Family Order of Johor (First Class)
29/01/25		
187	Presiden	President
188	Wakil Presiden	Vice President
189	Sumpah jabatan	Oath of office
190	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	Consultative Assembly of the Republic of Indonesia
191	Masa bakti	Term of office
192	Kabinet Merah Putih	Red and White Cabinet
193	Birokrat	Bureaucrats
194	Politisi	Politicians
195	Kepentingan nasional	The national interest
196	Sidang Kabinet Paripurna	Cabinet Plenary Meeting
197	Misi Asta Cita	The Asta Cita (the Eight Mission)
198	Cita-cita Indonesia Emas 2045	The vision of Golden Indonesia 2045
199	Anggota kabinet	The cabinet members
200	Peraturan Pemerintah	Government Regulation
201	Pemilihan Kepala Daerah Serentak	Simultaneous Regional Elections
202	Hak pilih	Voting rights
203	Daerah pemilihan	Electoral regions
204	Pesta demokrasi	Democratic fiesta
205	Aparatur Sipil Negara	State Civil Apparatus
206	Upah Minimum Nasional	National Minimum Wage



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

207	Sektor ketenagakerjaan	The labor sector
208	Badan Usaha Milik Negara	State-Owned Enterprises
209	Swasembada pangan	Food self-sufficiency
210	Harga Pembelian Pemerintah	Government Purchase Price
211	Pajak Pertambahan Nilai	Value Added Tax
212	Undang-Undang	Law
213	Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah	Luxury Goods Sales Tax
214	Insentif Pajak Penghasilan	Income Tax
215	Program Makan Bergizi Gratis	Free Nutritious Meal Program
216	Dewan Perwakilan Rakyat	The House of Representatives
217	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	State Budget
218	Badan Nasional Penanganan Bencana	National Disaster Management Agency
219	Kementerian Sosial	Ministry of Social Affairs
220	Instruksi Presiden Republik Indonesia	Instruction of President of the Republic of Indonesia
221	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Regional Budget
222	Konferensi Tingkat Tinggi APEC	APEC Summit
30/01/25		
223	Presiden	President
224	Menteri Energi dan Infrastruktur Persatuan Emirat Arab (PEA)	UAE Minister of Energy and Infrastructure
225	Menteri Luar Negeri	Minister of Foreign Affairs
226	Payung hukum	Legal framework
30/01/25		
227	Presiden	President
228	Tentara Nasional Indonesia	National Defense Forces
229	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Indonesian National Police
230	Kedaulatan negara	State sovereignty
231	Rapat Pimpinan	Leader's Meeting
232	Monopoli fisik	Physical monopoly
233	Monopoli senjata	Monopoly on weapons
30/01/25		
234	Presiden	President
235	Warga Negara Indonesia	Indonesian citizens
236	Kunjungan kenegaraan	Official Visit
237	Perdana Menteri	Prime Minister
31/01/25		
238	Presiden	President
239	Rapat terbatas	Limited meeting
240	Menteri Kabinet Merah Putih	Ministers of the Red and White Cabinet
241	Undang-Undang Dasar	Constitution
242	Kepentingan nasional	National interest

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**ATTACHMENT II
TAXONOMY ANALYSIS**

NO	ST	TT	TRANSLATION SHIFT				
			Level Shift	Category Shift			
				Structure Shift	Unit Shift	Class Shift	Intra-system Shift
1.	Acara kenegaraan	State events		V			V
2.	Administrasi negara	State administration		V			
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Regional Budget		V	V		
4.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	State Budget		V	V		
5.	Anggota DPR	Member of the parliament			V		V
6.	Anggota kabinet	The cabinet members		V			V
7.	Aparatur Sipil Negara	State Civil Apparatus		V		V	
8.	Badan Nasional Penanganan Bencana	National Disaster Management Agency		V			
9.	Badan Pangan Nasional	National Food Agency		V			



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

10.	Badan Usaha Milik Negara	State-Owned Enterprises		V	V		V
11.	Badan-badan khusus PBB	Special agencies of the United Nations		V			V
12.	Bantuan sosial	Social assistance		V			
13.	Birokrat	Bureaucrats					V
14.	Cita-cita Indonesia Emas 2045	The vision of Golden Indonesia 2045		V			V
15.	Daerah pemilihan	Electoral regions		V		V	V
16.	Dana pinjaman bergulir	Revolving loan fund		V			
17.	Delegasi	Delegates					V
18.	Dewan Ekonomi Nasional	National Economic Council		V		V	
19.	Dewan Perwakilan Daerah	The Regional Representative Council		V			V
20.	Dewan Perwakilan Rakyat	The House of Representatives			V		V

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

21.	Duta Besar Republik Indonesia di New Delhi	Indonesian Ambassador to India		V	V	V	
22.	Good governance	Good governance					
23.	Hak pilih	Voting rights		V			V
24.	Harga Pembelian Pemerintah	Government Purchase Price		V			
25.	Hubungan bilateral	Robust bilateral relations		V	V		V
26.	Hubungan bilateral	Bilateral ties		V			
27.	Hubungan bilateral	Bilateral relations		V			V
28.	Hubungan diplomatik	Diplomatic ties		V			
29.	Hubungan diplomatik	Diplomatic relations		V			V
30.	Hubungan yang erat	The close relations		V	V		V
31.	Ibu kota politik	Political capital		V	V		

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

32.	Insentif Pajak Penghasilan	Income Tax		V	V		
33.	Instruksi Presiden Republik Indonesia	Instruction of President of the Republic of Indonesia					V
34.	Isu pemberantasan korupsi	Corruption eradication		V	V		
35.	Isu strategis	Strategic issues		V			V
36.	Jajaran pemerintah	Government ranks		V		V	V
37.	Jaksa Agung	Attorney General					
38.	Jaksa Agung Muda	Attorney General Assistants				V	V
39.	Kabinet Merah Putih	Red and White Cabinet		V			
40.	Kebijakan	Adopted policies			V		V
41.	Kebijakan pemerintah	Government policies		V			V
42.	Kebijakan pro-rakyat	Pro-people policies		V			V



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

43.	Kedaulatan negara	State sovereignty	V			
44.	Kejaksaan	Attorney General's Office		V		
45.	Kemakmuran bangsa	The nation's advance	V			V
46.	Kementerian	Ministries				V
47.	Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi Republik India	Ministry of Electronics and Information Technology of the Republic of India	V			V
48.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Ministry of Energy and Mineral Resources	V	V		V
49.	Kementerian Kebudayaan Republik India	Ministry of Culture of the Republic of India				V
50.	Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia	Ministry of Culture of the Republic of Indonesia				V
51.	Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga Republik India	Ministry of Health and Family Welfare of the Republic of India				V
52.	Kementerian Kesehatan Indonesia	Ministry of Health of the Republic of Indonesia		V		V
53.	Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia	Ministry of Communication and Digital Affairs of the Republic of Indonesia		V		V



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

54.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Ministry of Communications and Informatics					V
55.	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Coordinating Ministry for Community Empowerment		V		V	
56.	Kementerian Pertanian	Ministry of Agriculture					
57.	Kementerian Sosial	Ministry of Social Affairs			V		V
58.	Kemerdekaan Indonesia	The independence of Indonesia					V
59.	Kepala Negara	The Head of State					V
60.	Kepala Negara	The President			V		V
61.	Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara	Head of the Nusantara Capital Authority		V	V		V
62.	Kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia	The importance of the Indonesian nation and people		V		V	V
63.	Kepentingan nasional	The national interest		V			V
64.	Kepentingan negara	The country's importance		V			V



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

65.	Kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu	Personal or certain group interest		V			
66.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Indonesian National Police		V		V	
67.	Kerja sama strategis	Cooperation			V		
68.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Head of the Supreme Audit Regency (BPK)		V			V
69.	Ketua Komisi VIII	Chairperson of Commission VIII					V
70.	Kuangan Negara	State Financial		V		V	
71.	Kinerja kabinet	The cabinet performance		V			V
72.	Komitmen pemerintah	The Government is committed to...		V		V	V
73.	Konferensi pers	Press conference		V			
74.	Konferensi Tingkat Tinggi APEC	APEC Summit		V	V		
75.	Kontinuitas pemerintahan	Continuity of the Government program			V		V



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

76.	Kunjungan kehormatan	Honorary visit		V		V	
77.	Kunjungan kehormatan	Courtesy call		V		V	
78.	Kunjungan kenegaraan	State visit		V		V	
79.	Kunjungan resmi	Official visit		V			
80.	Layanan publik	Public service		V			
81.	Lembaga legislatif	Legislative institutions		V			V
82.	Lembaga yudikatif	Judicial institutions		V			V
83.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	The People's Consultative Assembly		V		V	V
84.	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	Consultative Assembly of the Republic of Indonesia		V		V	V
85.	Mandat rakyat	The people's mandate		V			V
86.	Masa bakti	Term of office					V



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

87.	Masa pemerintahan	The Government performance					V
88.	Menteri dan wakil menteri	Ministers and deputy ministers					V
89.	Menteri Energi dan Infrastruktur Persatuan Emirat Arab (PEA)	UAE Minister of Energy and Infrastructure		V			
90.	Menteri Kabinet Merah Putih	Ministers of the Red and White Cabinet		V			V
91.	Menteri Kelautan dan Perikanan	Minister of Marine Affairs and Fisheries			V		V
92.	Menteri Komunikasi dan Digital	Minister of Communication and Digital Affairs			V		V
93.	Menteri Koordinator	Coordinating Minister		V		V	
94.	Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Coordinating Minister for Infrastructure and Regional Development		V		V	
95.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Coordinating Minister for Economic Affairs		V	V	V	V
96.	Menteri Luar Negeri	Minister of Foreign Affairs			V		V
97.	Menteri Luar Negeri India	Minister of External Affairs			V		V



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

98.	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reforms		V		V	V
99.	Menteri Perumahan	Minister of Housing and Residential Areas			V		V
100.	Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP)	Minister of Housing and Settlements			V		
101.	Misi Asta Cita	The Asta Cita (the Eight Mission)					V
102.	Monopoli fisik	Physical monopoly		V			
103.	Monopoli senjata	Monopoly on weapons					V
104.	Pajak Pertambahan Nilai	Value Added Tax		V		V	
105.	Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah	Luxury Goods Sales Tax		V	V		V
106.	Partai politik	Political parties		V			V
107.	Payung hukum	Legal framework		V		V	
108.	Pejabat negara	State officials		V		V	V

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

109.	Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)	The development of the new Capital of Nusantara		V	V		V
110.	Pembangunan nasional	National development		V			
111.	Pemerintah Indonesia	Indonesian government		V		V	
112.	Pemerintah Pusat	Central Government		V		V	
113.	Pemerintahan Republik Indonesia	The Government of the Republic of Indonesia					V
114.	Pemilihan Kepala Daerah Serentak	Simultaneous Regional Elections		V	V	V	V
115.	Peraturan Pemerintah	Government Regulation		V			
116.	Perdana Menteri	Prime Minister					
117.	Perdana Menteri India	Prime Minister of the Republic of India					V
118.	Perjuangan kemerdekaan	Independence struggle		V			
119.	Persaingan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi dunia	Geopolitical, geoeconomic, and global geostrategic competition		V			



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

120.	Pertemuan	Bilateral meetings			V		V
121.	Pesta demokrasi	Democratic fiesta		V		V	
122.	Politisi	Politicians					V
123.	Presiden	President					
124.	Prioritas pemerintah	The Government's priority		V			V
125.	Program Makan Bergizi Gratis	Free Nutritious Meal Program		V			
126.	Program prioritas pemerintah	Government's priority programs		V			V
127.	Program swasembada pangan	Food self-sufficiency program		V	V		
128.	Rapat Pimpinan	Leader's Meeting		V			
129.	Rapat terbatas	Limited cabinet meeting		V	V		
130.	Rapat terbatas	Limited meeting		V			

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

131.	Reformasi birokrasi	Bureaucratic reforms		V		V	V
132.	Resepsi diplomatik	Diplomatic reception		V			
133.	Sekretaris Kabinet	Cabinet Secretary		V			
134.	Sektor ketenagakerjaan	The labor sector		V			V
135.	Seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih	Red and White Cabinet Ministers		V	V		V
136.	Sidang Kabinet Paripurna	Plenary Cabinet Meeting		V			
137.	Sidang Kabinet Paripurna	Cabinet Plenary Meeting		V			
138.	Sidang Umum PBB	UN General Assembly		V			
139.	Sumpah jabatan	Oath of office					V
140.	Swasembada energi	Energy self-sufficiency		V	V		
141.	Swasembada pangan	Food self-sufficiency		V	V		

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

142.	Tamu kehormatan	Guest of honor					V
143.	Tamu negara	State guest		V		V	
144.	Tanda kehormatan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama	The Most Esteemed Royal Family Order of Johor (First Class)			V		V
145.	Tantangan geopolitik	Geopolitical challenges		V			V
146.	Tentara Nasional Indonesia	National Defense Forces		V			V
147.	Undang-Undang	Law					
148.	Undang-Undang Cipta Kerja	The Omnibus Law					V
149.	Undang-Undang Dasar	Constitution			V		
150.	Upacara kenegaraan	State ceremony		V		V	
151.	Upacara kenegaraan	Ceremonial reception		V		V	
152.	Upacara penyambutan kenegaraan	The state welcoming ceremony		V		V	V



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

153.	Upah Minimum Nasional	National Minimum Wage	V				
154.	Utusan Khusus Perdana Menteri	Special Envoy to the Prime Minister	V				V
155.	Visi Presiden	President's vision	V				
156.	Wakil Ketua DPR	Vice Speaker of the House of Representatives					V
157.	Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan	Deputy Minister of Marine Affairs and Fisheries			V		V
158.	Wakil Presiden	Vice President					

POLITICAL TERMS	TRANSLATION SHIFT	FREQUENCY	PERCENTAGE
2, 8, 9, 12, 16, 24, 26, 28, 39, 43, 65, 73, 79, 80, 89, 102, 110, 115, 118, 119, 125, 128, 130, 132, 133, 136, 137, 138, 153, 155	ST	IIII IIII IIII IIII IIII (30)	18,9%
3, 4, 31, 32, 34, 74, 127, 129, 140, 141	ST + UN	IIII IIII (10)	6,3%
5, 20, 40, 52, 53, 57, 60, 75, 91, 92, 96, 97, 99, 120, 144, 157	UN + INT	IIII IIII IIII I (16)	10,1%
7, 18, 55, 66, 70, 76, 77, 78, 93, 94, 104, 107, 111, 112, 121, 143, 150, 151	ST + CL	IIII IIII IIII III (18)	11,3%
10, 25, 30, 48, 61, 105, 109, 135	ST + UN + INT	IIII III (8)	5,0%
13, 17, 33, 49, 50, 51, 54, 58, 59, 69, 86, 87, 88, 101, 103, 113, 117, 122, 139, 142, 148, 156	INT	IIII IIII IIII IIII III (23)	14,5%
15, 36, 62, 72, 83, 84, 98, 108, 131, 152	ST + CL + INT	IIII IIII (10)	6,3%
38	CL + INT	I (1)	0,6%
21	ST + UN + CL	I (1)	0,6%
44, 67, 100, 149	UN	III (4)	2,5%
95, 114	ST + UN + CL + INT	II (2)	1,2%



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

22, 37, 56, 116, 123, 147, 158		No Shift	IIII II (7)	4,4%
NO	TRANSLATION SHIFT	FREQUENCY	PERCENTAGE	
1	ST + INT	28	18%	
2	ST	30	19%	
3	ST + UN	10	6%	
4	UN + INT	16	10%	
5	ST + CL	18	11%	
6	ST + UN + INT	8	5%	
7	INT	23	15%	
8	ST + CL + INT	10	6%	
9	CL + INT	1	1%	
10	ST + UN + CL	1	1%	
11	UN	4	3%	
12	ST + UN + CL + INT	2	1%	
13	No Shift	7	4%	
TOTAL		158	100%	